

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ali Zainuddin, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Az. Nasution, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Diadit Media, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.

Erman Rajagukguk, Sri Redjeki Hartono, H.E Saefullah, Tini Hadad, Toto Tohir, Romli Atmasasmita, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju

Halim Barkatullah Abdul, 2016, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung.

Johan Nasution Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju: Bandung.

Johan Nasution Bahder, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta

J. Setiadi Nugroho , 2010, *Perilaku Konsumen : Perspektif Kontemporer pada Motif Tujuan dan Keinginan Konsumen*, ctk. Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Lexy J. Moleong, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rodakarya, Bandung.

Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Subekti Raden, 1994, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Pertama, Intermedia, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2013. *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Alfabeta, Bandung.

Shofie Yusuf, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Cet 1, Jakarta:Ghalia Indonesia.

Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, ctk. 2, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Zulham,2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Kencan, Jakarta.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, PP No. 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang  
Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53/DPKK/I/K/69 Tentang  
Pendaftaran dan Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan Tukang Gigi

### **SKRIPSI DAN JURNAL ELEKTRONIK**

Liana Rahmayani, “Analisis pemakaian jasa pemasangan gigi tiruan sebagian lepasan  
akrilik pada dokter gigi dan tukang gigi di Desa Peuniti Banda Aceh”, *Jurnal  
PDGI*, Vol.61, Edisi 2 Mei 2012,